



බිම්හිඳුආරාධිකාරි තැනි

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමස්ත විකේතන දෙපාර්තමේන්තුව

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

විශ්වවිකේතන කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ආවේණික සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,

Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BALI

NOMOR B. 25.000.3.3/5858/CK/DISPUPR.PERKIM ✓

TENTANG

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM BURANA TITAB ✓

PADA KEGIATAN

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/ KOTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI ✓

Menimbang :

- a. bahwa proses tender Pekerjaan **Pembangunan SPAM Burana Titab** pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah selesai dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan 021 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali. ✓
- b. bahwa penetapan pemenang pekerjaan tersebut diatas telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan 021 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan Nomor : B.38.000.3.3/4213/P021.P2PA/B.PBJEK tanggal 28 Mei 2024 dan Berita Acara Reviu Laporan Hasil Pemilihan Nomor B.25.000.3.3/5857/CK/DISPUPR.PERKIM, Tanggal 30 Mei 2024. ✓
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan tersebut CV. Kuarsa Teknik dengan Nilai Penawaran setelah Koreksi Aritmatik Rp.9.866.990.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dinyatakan sebagai pemenang tender dengan metode Pascakualifikasi Satu File – Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan. ✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); ✓
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); ✓
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); ✓
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor : DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024, tanggal 28 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali; ✓
8. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor : B.29.180.1/1232/SEKRET/PUPRKIM, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Perusahaan
Nama : CV. Kuarsa Teknik ✓
NPWP : 70.340.293.3-908.000
Alamat : Perum Nuansa Asri Pesona Blok A/10, Desa Bongan Tabanan. Tlp. 08170665735, Pos-el : kuarsateknik@gmail.com ✓
- Untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan SPAM Burana Titab dengan Nilai Penawaran setelah Koreksi Aritmatik Rp.9.866.990.000 (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). ✓
- KEDUA : Penandatanganan Kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- KETIGA : Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu $5\% \times \text{Nilai HPS}$ yaitu $5\% \times \text{Rp. 12.649.996.935,10} = \text{Rp.632.499.846,76}$ dibulatkan menjadi Rp.632.499.900.00 (Enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktu jaminan pelaksanaan 180 hari kalender. ✓
- KEEMPAT : Pekerjaan harus dimulai saat diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). ✓
- KELIMA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ✓
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang
Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.03.1.01.0017)



Made Dwijadhana, ST 
NIP 19830502 201101 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali sebagai laporan.
5. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
6. PPTK Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.